

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul.

Visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 merupakan gambaran keadaan yang akan diwujudkan di bawah kepemimpinan Kepala Daerah terpilih 2017-2022 beserta arah tindakan yang dipersiapkan untuk mencapainya. Visi dan misi daerah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran sebagai gambaran keadaan yang akan dicapai. Selanjutnya visi dan misi diindikasikan melalui tolok ukur tertentu yang merepresentasikan capaian keberhasilan dampak pembangunan. Penyusunan tujuan dan sasaran ini merujuk pada RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005–2025 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III) dan RPJMN Tahun 2015–2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 dan RTRW Kabupaten Pati 2010–2030 serta Perda Nomor 1 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

4.1. Visi

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati – wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah:

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN
PELAYANAN PUBLIK”

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu:

- (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan;
- (2) meningkatnya pelayanan publik.

4.2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi dirumuskan untuk mendukung perwujudan unsur visi. Keterkaitan misi dan visi kabupaten Pati sebagai berikut : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik”.

Dukungan Misi dalam Pencapaian Unsur Visi

Unsur Visi	Misi	Penjelasan	Indikator Daerah
Meningkatnya Pelayanan Publik	Misi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik	Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan pelayanan public bebas KKN, responsif, dan akuntabel memberikan pelayanan public yang humanis dan berkelanjutan.	Indikator Tujuan: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Sasaran: 1. Indeks Profesionalitas ASN

4.3. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indicator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

(lihat Tabel IV)

Tabel IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PATI

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya SDM pemerintahan yang kompeten	Meningkatnya Profesionalitas ASN/PNS	Indeks Profesionalitas ASN/PNS	79	80	82	83	83,40
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan pelayanan kepegawaian	3,065	3,070	3,075	3,125	3,150